

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi :

- Andi Hamzah,, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008,
- Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta,
Pradnya Paramita, 1993.
- Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2007.
- A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum PIDana, Jakarta, Pradya Paramitha,
1983,
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2013,
- Chotib, L.J. van Apeldoorn, “Kewarganegaraan 1 : Menuju Masyarakat
Madini”, Jakarta, Yudistira Galia Indonesia,
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT.Citra Adtya
Bhakti, 2001.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2002,
- Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2003,

----- Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998,

----- Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, cetakan
ke-II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
2009,

Bernadeta Maria Erna Elastiani, Peranan Jaksa Dalam Pengembalian Aset
Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata, dalam makalah
Seminar Nasional “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan
Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui
Instrumen Hukum Perdata”, Bandung, Hotel Grand Aguila,
26 Oktober 2013,

C.S.T Kansil, S.H, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta, Balai Pustaka, 1986,

Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat
Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia
Indonesia, 1983.

D. Schaffmeister, et.al (diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy), Hukum
Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1995,

Dwi Priyatno, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, 2007

Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, Juni 2005.

Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, “Ilmu Perundang-Undangan”, jenis fungsi dan materi muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2003.

Hangkoso Satrio W, Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP., Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.

Indiyanto Seno Adji, “Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana”, Jakarta, Dedit Media, 2007.

----- Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta : Diadit Media, 2006,

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Malang, Banyuwangi Publising, 2011.

Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995,

Lawrence Friedman, "American Law", London: W.W. Norton & Company, 1984.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002,

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Bandung, Alumni, 2012.

----- Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Alumni, 2013,

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, Sofmedia, 2010.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011

Marlina, Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Mia Aminarti, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Februari 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.

-----*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.

-----*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1995,

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.

-----*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990.

-----*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1997.

Paul H. Robinson, *Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus-Mens Rea Distinction*, dalam Stephen Shute, John Gardner dan Jeremy Horder, (eds) *Action and Value in Criminal Law*, Oxford : Clarendon Press, 1993, Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

R.E.Baringbing, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi, 2001,

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, Jakarta, Mandar Maju, 2004.

-----*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995,

-----*Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan KORPORASI Melalui Pendekatan RESTOATIF Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Juli 2013.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1983,

Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Jakarta : Mandar Maju, 2004,

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya, Raja Grasindo, 2003.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981.

-----Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.

-----Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 2005,

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

----- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1985.

Soenaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 2006.

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Theodore S. Greenberg, et.al., *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide* Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture), Washington DC, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia (The World Bank), STAR, 2009,

U. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbitan Universitas, 1960.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Tesis Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 31.
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135559-T%2027980-Implikasi%20perampasan-Methodologi.pdf>,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindang Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rancangan Undang-Undang : “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”
http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/RUU%20KUHP_2013.pdf,

C. Sumber Lain

Aang Achmad, Wajah Hukum Pidana-Asas dan Perkembangannya “Kajian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) : Aspek Hukum Perdata Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia”, Gramata, Jakarta, 2012.

Adolfo Beria, *Global Strategi Against Corruption dalam Responding to Corruption; Social Defence, Corruption, and the Protection of Public Administration and The Independence of Justice, updated documents on the XIII International Congress on Social Defence, Lecce, Italy, 1996,*

Adnan Topan Husodo, Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010,

Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Yogyakarta, 2010.

Asep Warlan Yusuf, Jurnal “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Perpektif Hukum Administrasi)*” , Makalah, Seminar Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

-----Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009.

----- Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Tentang, Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Universitas Diponegoro, 1996,

David Frederiek Albert Parajow, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari, 2013,

Esmi Warassih, “Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Semarang, Suryandaru Utama, 2005,

Harkristuti Harkrisnowo Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money Laundering) sebagai bagian dari White Collar Crime, Makalah disampaikan pada seminar Money Laundering

(Pencucian Uang) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan
Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus, 2001,

Hazzel Croal (1992), White Collar Crime, dikutip oleh Harkristuti
Harkrisnowo.

Hendarman Supandji, Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan, makalah disampaikan
dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27
Februari 2009.

Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., Hak Asasi Manusia dan
Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, (alih
bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003,

Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pmeidanaan di Indonesia,
Malang, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi, “Teori dan Kebijakan Pidana”, Bandung,
Alumni, 1998,

----- “Substantive highlight’s dari Konvensi PBB Melawan
Korupsi, Makalah dalam Seminar Aspek
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari
Tindak Pidana Korupsi, Semarang : FH Undip, Mei 2004.

Satjipto Rahardjo, Beberapa Persoalan Sosiologis Pembangunan Ekonomi
Indonesia Khususnya Dalam Hubungannya Dengan
Rekayasa Hukum, Dalam Seminar Nasional Peranan

Hukum Pidanan Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi,
Semarang, 7 Desember 1990,

ST.Burhanuddin, “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara :
Jurnal Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam
Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen
Hukum Perdata” , Makalah, Seminar, Bandung, 26 Oktober
2013.

Yunus Husein, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol.7 No. 4, Desember 2010,

D. Laman

Aang Achmad, “Pergeseran Hukum Publik ke Dalam Lapangan Hukum Privat”,
Kajian Kasus BLBI, MIMBAR HUKUM, Volume 23, Nomor 3,
Oktober, 2011, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/KAJIAN-KASUS-BLBI-PENGGESERAN-HUKUM-PUBLIK-KE-DALAM-LAPANGAN-HUKUM-PRIVAT.pdf>, Ahmad Sudiro, *Konsep Keadilan*,
<http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/JurnalNo-3-Vol-19-JULI-2012/Ahmad-Sudiro-Full-Text-No-3-Vol-19-JULI-2012.pdf>, diakses 10 September 2014.

Anti Corruption Clearing House, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>;

Aedidikirawan”s Blog, <http://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010,

Benny Swastika, FH UI, 2011, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Pendahuluan.pdf>, Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, editor L. Sumartini et.al. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001,

Dwidja Priyatno, <http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptk>,

-----<http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptk>,

Eman Suparman, Penegakan Hukum dalam Pengembalian Aset Negara di Luar Negeri Hasil dari Korupsi, dalam makalah Seminar Nasional “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen

Hukum Perdata”, Bandung, Hotel Grand Aguila, 26 Oktober 2013.

Ferry Fernanda Eka Setyawan, FH Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>, Yunus Husein, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010,

Hari Purwadi, Jurnal “Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata” , Makalah, Seminar Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, Hotel Grand Aguila, 26 Oktober 2013.

HM Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, 16 Januari 2012, <http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/>.

H Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, Makalah disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, http://hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/3299191/makalah_penegakan_hukum.doc.

Hukumonline,

Laman

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>,

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Metro

TV

News,

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/22/1/203031/Indonesia-Peringkat-114-Negara-Bersih-dari-Korupsi>,

Ramelan, “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, , hlm. 152, laman

http://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf,

Ray Pratama Siadari, Pengertian Jenis-Jenis dan Tujuan Pidanaan, 2012, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>,

Romli Atmasasmita, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia, seminar dan lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli, 2003, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali->

- seminar/Hub%20Negara%20dan%20Masyarakat%20-%20romli%20atmasasmita.pdf,
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Tanpa Pidanaan, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf,
- Setyo Utomo, Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana, <http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/06/sistem-pidanaan-dalam-hukum-pidana.html>.
- S. Eka Iskandar, Perinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian II), Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Artikel hukum, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, September 2008,
- T. Subarsyah Sumadikara, Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata (Sebuah Pendekatan Hukum Akomodatif), dalam makalah Seminar Nasional “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata”, Bandung, Hotel Grand Aguila, 26 Oktober 2013,
- Verdianto I. Bitticaca “*Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, 2010.,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%20II.pdf> .

Yenti Ganarsih, Korupsi dan Pencucian Uang,
<https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/yenti-garnasih/>,